

MENGGALANG KAUKUS LINGKUNGAN HIDUP DI KALANGAN PARTAI DAN LEGISLATOR^{*}

Oleh : Angelina Sondakh, SE[†]

KATA PENGANTAR

Masalah lingkungan hidup dari waktu ke waktu memperlihatkan kompleksitas yang semakin tinggi dan krusial. Tidak hanya bagi Indonesia saja, yang sering di tuduh mengabaikan kelestarian alam dalam proses pembangunannya, tetapi berlaku juga bagi negara-negara industri maju, yang terbukti sebagai penyumbang terbesar atas rusaknya lapisan ozon di permukaan bumi.

Efek gas rumah kaca yang dihasilkan dari polusi pabrik-pabrik maupun asap kendaraan bermotor yang menghasilkan CO₂, telah memberikan andil signifikan terhadap perubahan iklim dunia saat ini. Sudah barang tentu, rusaknya hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang, baik di kawasan Amerika Latin dan Asia Tenggara juga tidak dapat diabaikan. Padahal hutan di Brazil dan di Indonesia, telah dianggap sebagai paru-paru dunia yang mempunyai peranan penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dunia.

Pertemuan akbar “ United Nation Climate Change 2007” yang akan di adakan di Bali bulan Desember yang akan datang, merupakan cermin dari adanya kekhawatiran yang sangat besar dari masyarakat dunia akan pentingnya me-minimalisasikan dampak kerusakan lingkungan akibat aktifitas ekonomi maupun eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terkontrol. Kerusakan lingkungan yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan ini, terbukti telah membawa perubahan iklim secara global ke arah yang negatif.

^{*} Disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Calon Legislator yang diselenggarakan oleh Sekolah Demokrasi Indonesia, Jakarta, 29-30 November 2007.

[†] Anggota DPR-RI Komisi X dari Partai Demokrat, Duta Orangutan OUREI (*Orangutan Republik Education Initiative*) yang berpusat di Santa Monica, USA. Pendiri WOMAN (*Women Act for Humanity and Environment*). Duta Batik Rakyat dan Duta Gerakan Gemar Membaca, Koman Perlindungan Anak pimpinan Kak Seto. Aktif diberbagai LSM yang berbasis Pendidikan, Pariwisata dan Lingkungan.

Di Indonesia sendiri, arah perubahan penggunaan sumber daya hutan telah sampai pada titik nadir yang dapat mengancam masa depan anak cucu kita. Pada tahun 1999, luas hutan kita masih tercatat 120.355.104 hektar dan telah menciut menjadi 97.804.246 hektar pada tahun 2004. Belum lagi potensi musnahnya kekayaan flora dan fauna kita, mengingat bumi Indonesia adalah tempat dari 10% total spesies tumbuhan berbunga, 12% total spesies mamalia, 16% reptile, 17% spesies burung dan 25% spesies ikan dunia.

Dari 250-an jenis primata yang ada di dunia, 40 jenis ada di Indonesia dan 29 di antaranya adalah asli hanya ada di Indonesia. Semua ini tidak mustahil hanya akan menjadi cerita belaka, apabila tidak ada suatu upaya bersama yang jelas, nyata dan terprogram dengan baik.

Memperjuangkan masalah kelestarian lingkungan memang tidak mudah karena isunya dianggap kurang *sexy* bagi para pelaku politik bahkan dalam tingkat tertentu dianggap kurang produktif karena tidak memberikan insentif seketika dan merupakan investasi jangka panjang. Oleh sebab itu, tidaklah aneh bila sebagian pihak memandang antara kepentingan ekonomi dan ekologi berada pada titik yang berseberangan.

Minimnya anggaran Kementerian Lingkungan Hidup yang hanya 0,1 dari total APBN pada Th. 2008 atau setara dengan Rp.456.752.799.000 ini, menandakan masih lemahnya kesadaran akan pentingnya peranan menjaga lingkungan hidup, sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

REALITAS KEPARTAIAAN KITA

Kehidupan kepartaian kita memiliki akar sejarah yang cukup panjang dan berliku-liku. Semenjak pasca kemerdekaan, berbagai sistem demokrasi yang berkaitan erat dengan kehidupan partai politik, pernah kita alami. Dari demokrasi liberal yang menekankan kebebasan sehingga melahirkan berbagai macam partai politik, "demokrasi ala Orde Baru" yang cenderung membatasi keberadaan partai politik atas nama pembangunan nasional, sampai demokrasi pasca reformasi seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Dari sekian masa tersebut, demokrasi saat inilah yang dianggap paling baik dan berada pada *track* yang benar meskipun belum sepenuhnya matang.

Pasang surut kehidupan partai politik nasional, sepertinya tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas dan tingkat kematangan sebuah partai. Kelahiran partai politik yang sering dibidani oleh figur tertentu, yang di perparah dengan suburnya budaya politik patrimonial di lingkungan partai, telah mengakibatkan partai politik belum mampu

menjalankan fungsinya dengan baik. Partai politik cenderung hanya sebatas sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan semata, belum mampu berperan sebagai alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dalam proses rekrutmen-pun beberapa partai cenderung mengabaikan kualitas para calon yang akan duduk di badan legeslatif. Pendekatan pertemanan atau *klik*, sering lebih dominan daripada melihat kapasitas dan kapabilitas seorang kandidat calon legeslatif. Hal ini semakin diperparah dengan sistem pemilihan umum yang belum sepenuhnya pro rakyat. Sistem pemilu yang berlaku sekarang, cenderung memberi otoritas penuh pada para elit partai untuk menempatkan caleg dalam daftar nomor urut jadi, sehingga memungkinkan kekuatan finansial seseorang, mendapatkan ruangan yang cukup memadai untuk menetapkan kebijakan internal partai.

Partai hanya dikuasi segolongan elit tertentu dengan pusat kekuasaan yang cenderung tersentralistis, sehingga tidak mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang populis. Dominasi pimpinan pusat dengan struktur cabang yang relatif lemah atau bahkan kurang eksis mengakibatkan mekanisme sistem kepartaian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama untuk berkomunikasi dengan pemilihnya. Akibatnya mudah di duga, partai-partai politik tidak memiliki kemampuan dalam pengembangan kebijakan. Padahal hal ini akan terkait secara langsung maupun tidak dengan kemampuan partai dalam membuat *platform* sesuai dengan masalah-masalah aktual yang berkembang di masyarakat maupun di lingkungan konsituen.

Kondisi ini pada akhirnya bermuara pula kemampuan fraksi maupun para anggotanya yang kebetulan duduk di parlemen, mengangkat fraksi merupakan kepanjangan dari partai. Dalam konteks ini, sebetulnya partai politik mempunyai peran yang sangat penting dan elemen sentral dalam meng-organisir serta meng-operasikan proses pembuatan Undang-Undang yang efektif.

Dengan sistem dan kondisi seperti ini, apa yang bisa diperbuat oleh segelentir anggota legeslatif yang *consent* pada isu tertentu ?. Padahal untuk memperjuangkan sebuah isu, diperlukan kerjasama yang semaksimal mungkin di antara para anggota legeslatif.

LEGISLATOR SEBAGAI PRODUK PARPOL

Realitas diatas setidak-tidaknya telah memberi gambaran sekilas kepada kita, tentang hubungan antara anggota legeslatif dengan partai politik bahwa kualitas legislator sangat terkait dengan kebijakan partai politik dalam proses rekrutmen para kadernya. Tidak

tertutup kemungkinan, bila rekrutmen tidak dilakukan dengan baik dan transparan, pada akhirnya akan menghasilkan anggota legeslatif yang lemah, minim inisiatif, dan memiliki kualitas maupun kapasitas yang kurang memadai.

Secara teoritis, anggota legeslatif mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi *budgeting*, legeslasi dan pengawasan. Fungsi *budgeting* berkaitan erat dengan penetapan anggaran pemerintah, fungsi legeslasi berhubungan masalah pembuatan dan Penetapan UU dan fungsi pengawasan bermuara pada kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Semenjak reformasi bergulir di tahun 1998, peran DPR sebagai sebuah lembaga legeslatif mengalami banyak perubahan yang cukup dramatis. Perubahan pada dasar negara, UUD 1945 terutama pasal 20A ayat (1), (2) dan (3), telah memperkuat peranan anggota DPR saat ini di bandingkan pada masa sebelumnya, sehingga memberi peluang yang lebih besar bagi para anggota legeslatif untuk menjalankan fungsinya secara maksimal dalam proses pembuatan UU.

Dalam pasal 20A (1), dinyatakan bahwa "DPR memegang kekuasaan untuk membuat Undang-Undang" dan pada ayat (2)nya dinyatakan "Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mencapai kesepakatan bersama". Bila tidak ada kesepakatan maka sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3) :RUU yang bersangkutan tidak boleh diajukan lagi selama periode DPR tersebut".

Dominannya RUU yang berasal dari inisiatif pemerintah dibandingkan dengan RUU yang lahir atas inisiatif DPR, meng-indikasikan masih lemahnya daya kreasi dan respon legislator dalam melihat berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat..

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri secara umum, kualitas dan peran legeslatif saat ini jauh lebih baik meskipun masih memerlukan berbagai pembenahan dan perbaikan, baik dalam konteks peningkatan SDM-nya (termasuk para *supporting staf*) maupun sistem (birokrasi) yang menunjang kinerja para anggota legeslatif dalam proses pengambilan keputusan untuk mengesahkan UU.

LINGKUNGAN SEBAGAI ISU SEXY

Pada dekade tahun 1990-an, isu lingkungan dianggap tidak begitu menarik untuk di jual sebagai bagian dari strategi perjuangan partai dalam meraih simpati para pemilih. Dalam konteks pemilu 2004 yang lalu, hanya beberapa partai saja yang memasukkan isu

lingkungan hidup sebagai bagian dari *platform* mereka. Begitu pula isu kampanye yang di sampaikan para caleg, masih sangat minim bahkan nyaris tidak di singgung sama sekali.

Kondisi semacam ini sudah barang tentu, meng-indikasikan bahwa tingkat pemahaman dan kepedulian terhadap isu lingkungan di kalangan partai-partai politik sebagai institusi maupun di kalangan legislator sebagai individu, masih relatif rendah. Hal ini sudah barang tentu sangat di sayangkan, mengingat isu kelestarian lingkungan seharusnya mendapat porsi yang cukup memadai.

Tingginya intensitas bencana lingkungan yang terjadi belakangan ini yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup, seharusnya menjadi titik balik bagi partai-partai politik dan legislator untuk memakai isu ini sebagai isu *sexy* yang dapat meningkatkan *pamor* mereka. Kerusakan lingkungan hidup, telah memberi dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat yang di tandai dengan anomali cuaca maupun musim yang akan berpengaruh besar pada sektor pertanian dan kesehatan. Maupun terjadinya bencana alam dimana-mana (kekeringan, banjir dan tanah longsor).

Masyarakat semakin menyadari bahwa perbaikan lingkungan merupakan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan karena pada hakekatnya, kerusakan lingkungan telah menjadikan masyarakat semakin miskin. Oleh karena itu, para legislator tidak lagi mesti menomorduakan isu lingkungan karena isu ini telah menjadi isu yang *sexy*.

MENDORONG KAUKUS LINGKUNGAN

Menurut kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka edisi ke-3, kata "Kaukus" di artikan sebagai pertemuan tertutup antara tokoh partai politik untuk merencanakan strategi, kebijakan, program yang akan dikemukakan di pertemuan terbuka partai. Oleh sebab itu, pengertian kaukus mengarah pada suatu bentuk koalisi antar partai dalam menyuarakan dan memperjuangkan isu-isu tertentu.

Sebagai sebuah koalisi, sudah barang tentu kesamaan visi dan misi harus menjadi landasan utama. Kesamaan visi dan misi akan lahir apabila kesadaran bersama akan pentingnya isu lingkungan hidup, telah terbentuk. Apabila kita mengacu pada uraian di atas, maka untuk mengalang kaukus lingkungan di tingkat partai politik sebagai sebuah institusi, akan relatif berbeda dengan penggalangan kaukus di tingkat individu (legislator).

Di tingkat partai politik, sudah barang tentu penggalangan akan dilakukan antar institusi dengan melibatkan elit partai maupun institusi lain yang bergerak khusus di isu Lingkungan (LSM) sebagai pengambil kebijakan. Dalam konteks ini, loby memiliki peran yang penting dengan memberikan masukan-masukan maupun informasi aktual tentang isu lingkungan hidup. "Intervensi" bisa juga dilakukan jauh-jauh hari menjelang penyelenggaraan pemilu dengan target utama, memasukkan isu lingkungan hidup ke dalam *platform* partai.

Di tingkat legislator, penggalangan kaukus akan lebih mudah dilakukan mengingat, peran loby yang bersifat individual lebih bersifat sederhana. Identifikasi terhadap personal legislator sangat penting, baik berdasarkan keterikatan sebagai anggota komisi yang mewadahi masalah yang berkaitan dengan isu lingkungan (komisi VII) dan Komisi IV (Kehutanan), maupun berdasarkan ketertarikan secara individual.

Sudah barang tentu, komunikasi yang intens melalui berbagai wadah dan bentuk yang disertai tingkat pemahaman yang memadai terhadap isu ini, akan sangat membantu sekali dalam mendorong percepatan kaukus lingkungan di kalangan para legislator.****